

JURNAL ILMIAH

**UPAYA POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
BERUPA PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**



Disusun Oleh :

RINALDO ARJANGGI

NPM	:070509764
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015**

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**UPAYA POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
BERUPA PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

Disusun Oleh :

RINALDO ARJANGGI

NPM	:070509764
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 27 Juli 2015**

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge S.H., M.Hum.

UPAYA POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA BERUPA PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

Disusun oleh
Rinaldo Arjanggih

ABSTRACT

State of Indonesia is a country based on law that its sovereignty rests with the people and carried out in accordance with the constitution of 1945. The general election is a means to realize the people's sovereignty in the country. However, the implementation of the legislative general election spawned many complaints on its implementation; the processes and mechanisms that it often leads to violations and crimes of partly society (including political parties) then born the implementation demands of overflowing and fair general election. The efforts of the police in dealing with crime in the form of electoral malpractices are indispensable in creating a high-grade legislative general election. The problem formulation of this research was how the efforts of the police in dealing with crime in the form of legislative electoral malpractices and any constraints experienced by police in handling violation of legislative general election. This research was a normative law that focuses on positive legal norms and the methods of drawing conclusions was deductively by drawing inference from common things to the special things. Legislative general election was general election to choose members of parliament, local councils and regional parliaments. Police was all particular things related to the functioning and police agencies in accordance with the legislation. The efforts of the police in dealing with criminal acts such as the breach of legislative general election was the police cooperated with the prosecutor and general election law society in analyzing, filtering and determine whether a criminal act was an act of criminal offenses or administrative violations of legislative general election. The constraints faced by the police in dealing with violations of legislative general election was the lack of evidence and the time setting in dealing with violations of general election was too short and difficult for the police.

Keywords: *Violations, legislative general election, police, Criminal act.*

ABSTRACT

Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum yang kedaulatannya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara. Akan tetapi penyelenggaraan Pemilu legislatif banyak melahirkan keluhan pada implementasinya, pada proses dan mekanisme yang tidak jarang menimbulkan pelanggaran dan kejahatan sebagian masyarakat

(termasuk Parpol) yang kemudian lahir tuntutan-tuntutan pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Kepolisian merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menangani berbagai pelanggaran sebagai bentuk penegakkan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang jujur dan adil. Upaya-upaya kepolisian dalam menangani perbuatan pidana berupa pelanggaran pemilihan umum sangat diperlukan dalam menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang berkualitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif dan apa saja kendala yang dialami kepolisian dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum legislatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif dan metode penarikan kesimpulan adalah secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Pemilihan umum legislatif adalah pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya kepolisian dalam menangani perbuatan pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif adalah kepolisian bekerjasama dengan kejaksaan dan badan pengawas pemilihan umum dalam menganalisa, memfilter dan menentukan apakah perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan pelanggaran pidana atau pelanggaran administrasi pemilihan umum legislatif. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani pelanggaran pemilihan umum legislatif adalah kurangnya alat bukti dan waktu yang ditetapkan dalam menangani pelanggaran pemilihan umum terlalu singkat dan menyulitkan kepolisian.

Keywords: Pelanggaran, Pemilihan Umum Legislatif, Kepolisian, Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum yang kedaulatannya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam menjalankan pemerintahan Indonesia menjunjung tinggi paham demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan di Indonesia merupakan perwujudan dari amanah Pancasila Sila ke-4 yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, namun pemerintahan yang berdaulat rakyat membutuhkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpin mereka sendiri, Indonesia terdiri dari berbagai macam provinsi dan daerah provinsi itu terdiri dari kabupaten dan kota, masing-masing kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerahnya. Pemerintahan daerah provinsi, daerah, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin

pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang sesuai dengan isi Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

KPU dibentuk dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Dalam menjalankan tugasnya KPU harus berpedoman pada asas :Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011, dalam menjalankan pemilu KPU dipercayai oleh masyarakat untuk dapat melaksanakan pemilu yang bersih dan mampu menampung seluruh hak suara masyarakat. Oleh karena itu pemilu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun pada kenyataannya seiring berjalannya waktu kita sering menjumpai berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan dan/atau

pengurangan suara, *money politics*, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), *black campaign*, dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada KPU dan menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga berakibat pada ketidakstabilan politik di Indonesia. Dengan perkembangan penyelenggaraan Pemilu banyak melahirkan keluhan pada implementasinya, pada proses dan mekanisme yang tidak jarang mengundang kecurigaan dan kecemburuan sebagian masyarakat (termasuk Parpol), dari kecurigaan dan kecemburuan itu, kemudian lahir tuntutan pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil.¹

Untuk menanggulangi persoalan seperti yang telah disebutkan di atas maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pemilu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 17: Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan pengawasan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Bawaslu Provinsi yang mengawasi pemilu di provinsi membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota kemudian

¹J. Kristiadi, 1997, *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil*, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta, hlm. 15.

membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pemilu di tingkat kecamatan atau sejenis, Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Lapangan untuk mengawasi pemilu di tingkat desa atau sejenis, hal ini untuk memenuhi peran Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pemilu di seluruh tingkatan mulai dari desa hingga pusat yang terdiri dari provinsi-provinsi.

Pelanggaran Pemilu dapat dilakukan oleh orang-perorangan dan Parpol (sebagai peserta pemilu), KPU (selaku penyelenggaraan Pemilu), dan Bawaslu (sebagai pengawas Pemilu), KPU dan Bawaslu baik selaku lembaga melalui kebijakan lembaga terkait pemilu dan/atau orang perorangan yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemimpin/anggota KPU yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu, juga dari peserta pemilu, peserta pemilu yang dimaksud adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana yang disebut di atas maka dibutuhkan suatu peraturan hukum agar memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran pemilu, penerapan sanksi pidana dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.² Hal ini diakibatkan oleh maraknya pelanggaran pemilu yang terjadi pada tahun 2014 sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabag Penum Polri Kombes Agus Rianto di kantornya, Jakarta, Senin (21/4/2014) bahwa ‘Sampai dengan 20 April, jumlah yang ditangani Polri 183 kasus dengan tersangka 226 orang’. Polri mencatat kasus pidana pemilu sebelum masa

²Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Pratik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

kampanye hingga pencoblosan Pileg 9 April 2014 yang ditangani ada 183 kasus. Dari kasus tersebut, 226 orang dijadikan tersangka.³ Pidana yang dimaksud adalah ketentuan pidana sebagaimana yang tertera dalam BAB XXII UU Nomor 8 Tahun 2012, penerapan pidana tersebut ternyata selama ini sulit untuk diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran pemilu bisa dilakukan oleh orang-perorangan/Parpol selaku peserta pemilu yang bekerjasama dengan KPU, disatu sisi KPU selaku lembaga yang berbentuk Badan Hukum bukan merupakan subjek hukum pidana sehingga tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan orang perorangan baik selaku pemimpin/anggota KPU yang menyalahgunakan kewenangannya akan disidang dalam sidang Kode Etik dan dijatuhi sanksi administratif yang maksimal hanya berupa pemecatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran pemilu harus diterapkan mulai dari tingkat paling bawah yakni tingkat desa ataupun sejenis agar persoalan pelanggaran pemilu tidak terus berlangsung secara berulang-ulang dan menimbulkan kekacauan (*chaos*) di dalam masyarakat sebagai peserta pemilu. Sebagai contoh banyak kasus *money politics* yang dihentikan karena

³Edward Panggabean, 27 April 2014, *Polri : Pidana Pemilu 2014 capai 183 kasus, Tersangka 226*, www.news.liputan6.com/read/2039863/polri-pidana-pemilu-2014-capai-183-kasustersangka-226, yang diakses pada tanggal 23 September 2014.

sulitnya barang bukti, sebagaimana ditulis oleh Fransisco Rosarian dan Pito

Agustin Rudiana di koran tempo :

Markas Besar Kepolisian RI menghentikan 17 kasus dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum legislatif pada 9 April lalu. Kepolisian mengklaim tidak menemukan bukti. Kepolisian mencatat sedikitnya ada 38 pelanggaran perbuatan pidana pemilu selama kampanye terbuka. Salah satu kasus yang dihentikan itu adalah kasus politik uang yang diduga dilakukan calon legislator Partai Amanat Nasional Yogyakarta, Hanafi Rais, dengan komunitas Sinar Sang Surya yang terjadi di Gunungkidul, Desember 2013.⁴

Banyaknya kasus pelanggaran pemilu yang terjadi serta tidak adanya penegakan hukum dengan penerapan sanksi pidana yang harusnya dapat menimbulkan efek jera sehingga pelanggaran pemilu tidak terjadi berulang kali. Tidak adanya penegakan hukum menyatakan hilangnya hak masyarakat dalam pemilu dan tidak berjalannya pemilu yang luber dan jurdil, tidak berjalannya demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi. Di sisi lain tidak adanya penegak hukum mengakibatkan tidak berjalannya supremasi hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul **“Upaya Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Berupa Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif”**.

⁴Fransisco Rosarian dan Pito Agustin Rudiana, 23 April 2014, *Polisi Hentikan Belasan Kasus Politik Uang*, <http://koran.tempo.co/konten/2014/04/23/340459/Polisi-Hentikan-Belasan-Kasus-Politik-Uang>, diakses pada tanggal 23 September 2014.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya polisi dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif?
2. Apa kendala yang dihadapi polisi dalam penanganan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau yang disebut dengan penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi: Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang di peroleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu Bapak Singgih Suhartaya, SH, Kepala Unit Kejahatan Terhadap Negara di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisis data yang didasarkan pada interpretasi hukum, memahami atau mengkaji data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dengan penulis dan yang diperoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁵ Kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Upaya Polisi Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum

Legislatif

1. Upaya Polisi Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum

Legislatif

⁵Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, hlm.197.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Singgih Suhartaya, SH Kepala Unit Kejahatan Terhadap Negara, persyaratan penyidik yang tergabung di dalam satuan/unit penyidikan pelanggaran pemilihan umum legislatif (sentra gakkumdu), antara lain:

1. Bertugas pada fungsi reserse kriminal;
2. Mempunyai mental dan dedikasi yang tinggi, ulet, aktif, dan penuh tanggung jawab;
3. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum;
4. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang penyidikan perkara pidana dan mahir melakukan pemberkasan perkara serta menguasai administrasi penyidikan;
5. Telah mengikuti pelatihan penyidikan pelanggaran pemilihan umum.

Dapat dikatakan bahwa sentra gakkumdu inilah yang menganalisis dan menentukan bahwa suatu tindak pidana pemilihan umum legislatif ini digolongkan sebagai kejahatan pemilihan umum legislatif atau pelanggaran pemilu legislatif. Apabila perbuatan tersebut adalah pelanggaran pemilu legislatif maka akan dilanjutkan/dilaporkan kepada pihak polisi untuk menindak lanjuti lebih lanjut pelanggaran pemilu tersebut.

Polisi menerima laporan pelanggaran pemilihan umum dari bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwaslu

kecamatan, pengawas pemilihan umum lapangan, dan pengawas pemilihan umum luar negeri melalui sentra gakkumdu. Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam buku register polisi tersendiri. Laporan tersebut disampaikan secara tertulis yang memuat :

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Pihak terlapor;
3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
4. Uraian kejadian.

Penyidik pelanggaran pemilihan umum legislatif, setelah mempelajari dan mendiskusikan tentang laporan yang diterima, segera menentukan apakah pelanggaran pemilihan umum legislatif yang dilaporkan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 273 sampai dengan pasal 291 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Dalam hal gabungan pelanggaran pemilu dengan kejahatan lainnya, penyidikannya dilakukan dengan mendahulukan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh tim penyidik pelanggaran pemilihan umum legislatif, sedangkan kejahatan lain disidik oleh penyidik reskrim di luar tim penyidik pelanggaran pemilihan umum legislatif sesuai dengan hukum acara pidana dengan pemberkasan terpisah/*splitzing*.

Polisi dalam melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka, harus memperhatikan faktor kecepatan dan ketepatan waktu, antara lain aktif mendatangi para saksi maupun tersangka dan melakukan pemeriksaan di tempat. Tersangka pelanggaran pemilihan umum legislatif walaupun memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, tindakan penahanan tidak perlu dilakukan apabila situasinya tidak memungkinkan karena faktor keamanan dan dampak yang ditimbulkan.

Jika ditelaah lebih mendalam maka dapat dikatakan bahwa laporan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif yang diterima polisi hanya berasal dari badan pengawas pemilihan umum. Artinya bahwa setiap pelanggaran pidana pemilu yang diketahui oleh masyarakat harus dilaporkan kepada badan pengawas pemilihan umum setelah itu badan pengawas pemilihan umum yang akan memfilter laporan tersebut apakah laporan itu termasuk pelanggaran pemilu dan kemudian melanjutkannya ke polisi.

2. Kendala Polisi Dalam Menangani Pelanggaran Pidana Pemilu Legislatif

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi polisi dalam menyelesaikan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif. Kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Kurang Alat Bukti

Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mengungkapkan suatu tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif bagi polisi. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁶ Polisi dalam menetapkan tersangka minimal harus berdasarkan dua alat bukti. Dalam Pasal 184 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Laporan pelanggaran pemilihan umum oleh badan pengawas pemilihan umum kepada polisi sering tidak disertai alat bukti. Kesulitan polisi yang berhubungan dengan alat bukti adalah tidak adanya saksi yang memberikan keterangan tentang pelanggaran pemilihan umum legislatif. Hal ini seringkali membuat polisi kesulitan mengembangkan dan mengungkapkan kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan umum legislatif dalam rentang waktu singkat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

b. Waktu Penanganan Yang Terbatas

⁶<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, diakses pada tanggal 11 juni 2015

Dalam penanganan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif oleh polisi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Polisi ditentukan untuk mengungkapkan pelanggaran pemilu dengan jangka waktu 14 hari yaitu tindakan penyelidikan, penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang harus diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Apabila berkas acara pemeriksaan dikembalikan oleh kejaksaan kepada polisi karena kurang lengkap maka dalam jangka waktu 3 hari, polisi diwajibkan untuk melengkapi berkas tersebut. Jangka waktu yang singkat ini dirasakan sulit jika dibandingkan dengan jangka waktu penyidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut:

Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

- a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
- b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
- c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
- d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

Jangka waktu yang sangat singkat ini merupakan kesulitan sekaligus tantangan yang berat bagi polisi dalam mengungkapkan pelanggaran pemilihan umum legislatif karena harus menyelesaikan tiga proses dalam 14 hari yaitu proses penyelidikan, penyidikan dan berita acara pemeriksaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai upaya polisi dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilu legislatif maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya polisi dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif adalah bekerjasama dengan instansi atau lembaga negara lain yaitu badan pengawas pemilihan umum dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerima laporan tindak pidana berupa pelanggaran dan bersama-sama menganalisa, memfilter dan menentukan apakah tindak pidana tersebut merupakan perbuatan pelanggaran atau pelanggaran administrasi pemilihan umum legislatif. Upaya polisi yang lain yaitu menerima laporan pelanggaran pemilihan umum legislatif dari badan pengawas pemilihan umum, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pemilu legislatif tersebut dan membuat berkas acara pemeriksaan dan melanjutkannya ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan pelanggaran pemilihan umum legislatif.

2. Kendala yang dihadapi polisi dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif yaitu:

a. Kurangnya alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi dalam menyikapi laporan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif. Alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif.

b. Waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah untuk menangani pelanggaran pidana pemilihan umum legislatif terlalu singkat dan menyulitkan polisi. Polisi diamanatkan mengungkap tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif selama 14 hari dan jika berkas acara pemeriksaan ditolak oleh kejaksaan maka diberi kesempatan 3 hari untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan.

Daftar Pustaka

Buku

- AndiHamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta.
- Aribowo, 1996, *Mendemokratiskan Pemilu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Banarusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T.Kansil, 1970, *Memilih Dan Dipilih*, PT. PradnyaParamita, Jakarta.
- Edward Panggabean, 27 April 2014, *Polri :Pidana Pemilu 2014 capai 183 kasus, Tersangka*.
- H. PudiRahardi. M. H., 2014, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- J. Kristiadi, 1997, *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil*, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta.
- Kanter EY dan Sianturi, SR, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Trans nasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Yogyakarta.

Simons Dalam Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.

Website

[www.news.liputan6.com/read/2039863/polri-pidana-pemilu-2014-capai-183-](http://www.news.liputan6.com/read/2039863/polri-pidana-pemilu-2014-capai-183-kasustersangka-226)

[kasustersangka-226](http://www.news.liputan6.com/read/2039863/polri-pidana-pemilu-2014-capai-183-kasustersangka-226) diakses pada tanggal 23 September 2014.

<http://koran.tempo.co/konten/2014/04/23/340459/Polisi-Hentikan-Belasan-Kasus->

[Politik-Uang](#), diakses pada tanggal 23 September 2014.

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/166/Pengantar-Menelusuri-Jejak-jejak->

[Praktek-Demokrasi](#), diakses tanggal 23 September 2014.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>,

diakses pada tanggal 11 Juni 2015.

<http://www.kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 13 Juni 2015.

